

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian berarti anak-anak yang dengan berkebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan anak-anak berkesulitan belajar juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Agar semua anak berkebutuhan pendidikan khusus dapat ditampung di SLB. Salah satu penyebab masih terbatasnya jumlah SLB adalah biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibanding dengan sekolah biasa/regular. Selain itu SLB yang ada biasanya berlokasi di ibu kota propinsi, kabupaten, padahal anak berkebutuhan khusus tersebar di daerah yang sulit dijangkau.

Kesulitan belajar (*Learning Disability*), terdiri dari kesulitan belajar umum seperti lamban belajar (*Slow Learner*), dan kesulitan belajar khusus yaitu kesulitan belajar pada bidang pelajaran tertentu saja misalnya kesulitan membaca (*disleksia*), kesulitan berhitung (*Diskalkulia*) dan kesulitan menulis (*Disgrafia*). Anak-anak ini, seperti anak-anak yang memerlukan layanan khusus, merupakan bagian dari mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus yang juga mendapat pendidikan yang tepat akan dapat dikembangkan potensinya secara optimal.

Sebagian dari anak yang memerlukan layanan khusus itu mungkin sekali selama ini belajar di sekolah biasa/regular. Namun karena tidak ada

pelayanan khusus di sekolah reguler, maka anak-anak ini mempunyai potensi besar untuk mengulang kelas dan akhirnya putus sekolah.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dikembangkan pendidikan terpadu (inklusi) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan khusus. Selama ini pendidikan terpadu baru diselenggarakan untuk anak berkebutuhan pendidikan khusus, namun belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Agar pengembangan pendidikan terpadu dapat dilaksanakan efisien dan efektif dan tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan suatu manajemen sekolah terpadu (inklusi) yang baik.

Pengelolaan sekolah akan efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan *task commitment* (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Apabila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektifitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal. Manajemen sekolah, memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi input siswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan manajemen, lingkungan, dan kegiatan belajar mengajar (Depdiknas 2003:1-2)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang

mengalami kelainan dalam penglihatan, pendengaran, proses mental, memfungsikan sebagian anggota badan, tingkah laku anak yang mengalami tingkat kesulitan belajar berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lain (anak normal) dalam pendidikan.

Digulirkannya reformasi dan kebersamaan era globalisasi kehidupan penuh persaingan, maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya dibidang pendidikan dasar di Indonesia, sehingga dapat memunculkan adanya fenomena baru dibidang pendidikan dasar, yaitu munculnya pelaksanaan pendidikan tingkat dasar dengan nama Sekolah Dasar Inklusi.

Landasan filosofis utama pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika, Depdiknas 2003: 9, dalam Mulyono Abdulrahman, 2003: 6). Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebhinekaan manusia, baik kebhinekaan fertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal umat Tuhan di bumi ini. Kebhinekaan fertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan financial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan sebagainya. Sedangkan kebhinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, budaya bahasa, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dan sebagainya. Karena berbagai keragaman namun dengan kesamaan misi menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dengan dilandasi saling membutuhkan.

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan berkebakatan hanyalah satu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Didalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaiknya didalam individu berbakat pastilah terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada

mahluk di bumi ini yang sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistim pendidikan.

Di Indonesia, manajemen pendidikan inklusi dijamin oleh: (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999, tentang Sistim Pendidikan Nasional, (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Sistim Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus, dan (4) keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/u/1986 pasal 1 ayat 1 bahwa, pendidikan terpadu adalah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak cacat yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan, (5) Surat Edaran Dirjen Nomor 380/C.C6/MN/2003 Perihal Pendidikan Inklusi. Kebetulan SD Negeri 2 Sragen dijadikan SD Inklusi yang telah ditunjuk dari Diknas Kabupaten Sragen dengan kep. Mendikbud No. 002/LJ/1986 Pendidikan Sekolah Terpadu SE Diden Dikdasmen Depdiknas No. 380 C.CS/MN/2003 untuk melaksanakan program pendidikan inklusi.

Landasan pedagogis manajemen pendidikan inklusi adalah pada pasal 3 Undang-Undang No 20 Th 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Landasan empiris penelitian tentang manajemen inklusi telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980an, namun penelitian yang

berkala besar dipelopori oleh *the national Academy of Sciences* (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif.

Selama ini pendidikan bagi anak berkelainan disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah berkelainan (SLB), Sekolah Luar Biasa (SDLB), dan pendidikan inklusi (terpadu). SLB sebagai lembaga pendidikan tertua, menampung anak dengan jenis kelamin yang sama, sehingga ada SLB Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, Tunaganda. Sedang SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras dan tunaganda.

Para pendukung konsep pendidikan inklusi mengajukan argument antara lain: (1) belum banyak bukti empiris yang mendukung asumsi bahwa layanan pendidikan khusus yang diberikan di luar kelas reguler menunjukkan hasil yang lebih positif bagi anak, (2) Biaya sekolah khusus relative mahal daripada sekolah umum, (3) Sekolah khusus mengharuskan penggunaan label berkelainan yang dapat berakibat negative pada anak, (4) Banyak anak berkelainan yang tidak mampu memperoleh pendidikan karena tidak tersedia sekolah khusus yang dekat, (5) Anak berkelainan khusus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama masyarakat lain.

Sedangkan para pakar yang mempertahankan berbagai alternative penetapan pendidikan bagi anak berkelainan berargumentasi: (1) Peraturan perundangan yang berlaku masyarakat bahwa bagi anak yang berkelainan disediakan layanan pendidikan yang bersifat kontinu, (2) Hasil penelitian tetap mendukung gagasan perlunya berbagai alternative penempatan pendidikan bagi anak berkelainan, (3) Tidak semua orang tua menghendaki anaknya berkelainan berada di kelas berkelainan reguler bersama teman-teman seusianya yang normal, (4) Pada umumnya sekolah reguler belum siap

menyelenggarakan pendidikan inklusi karena keterbatasan sumber daya pendidikannya.

Namun yang menjadi pokok persoalan adalah ingin mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar dengan meningkatkan layanan pendidikan pada anak berkelainan baik secara kuantitas maupun kualitas. Melalui pendidikan kita akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, manusia yang memahami hak dan kewajiban, manusia yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, cerdas, kreatif, trampil, disiplin dan tanggungjawab, serta sehat jasmani rohani, mempunyai semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, dan berorientasi pada masadepan. Program wajib belajar yang telah lama dicanangkan pemerintah, perlu disambut dengan meningkatkan layanan pendidikan pada anak-anak berkelainan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Selama ini, pendidikan bagi anak yang berkelainan diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sementara itu, lokasi SLB pada umumnya berada di ibukota kabupaten, karena faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena jauh dari rumah, sedang SD terdekat tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain selama ini diterima di SD terdekat, namun karena tidak adanya pelayanan khusus bagi mereka akibatnya tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Akibat lebih jauh program wajib belajar akan sulit tercapai.

Sedang di lingkungan SDN 2 Sragen terdapat berbagai macam kemampuan belajar siswa. Ada siswa yang cepat belajarnya, ada yang sedang, dan ada yang lamban belajarnya. Dalam hal ini siswa yang lamban belajarnya bisa juga disebabkan karena berkelainan dalam hal tertentu. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakan pendidikan terpadu yang berorientasi pada masalah kesulitan belajar.

Untuk dapat mengelola pendidikan berkarakter dengan baik, salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengadakan pelatihan. Pelatihan pendidikan berkarakter dirancang untuk meningkatkan keterampilan antar personal. Hal itu juga dapat digunakan untuk mengembangkan perilaku yang diinginkan untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan di masa datang. Proses ini menyadarkan diri pada perlunya partisipasi, umpan balik dan pengulangan-pengulangan. Secara khusus, keberadaan SD inklusi merupakan hal yang menarik untuk dicermati. Hal ini, karena sebagian dari sekolah inklusi masih baru. Tujuannya mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus lamban belajar?” Fokus tersebut dirinci menjadi 4 subfokus, yaitu:

1. Bagaimana pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus?
2. Bagaimana pengorganisasian pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus?
4. Bagaimana evaluasi pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus?

## **C. Tujuan Pendidikan**

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan Pengelolaan pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus lamban belajar.

Secara khusus penelitian ini ada empat tujuan, yaitu untuk mengetahui:

1. Perencanaan pendidikan karakter pada pendidik anak berkebutuhan khusus.
2. Pengorganisasian pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus.

3. Pelaksanaan pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus.
4. Evaluasi pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan menerapkan untuk kasus nyata yang terjadi di lapangan.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Bagi, penyusun untuk memperoleh inspirasi, persepsi, dan kreatifitas dalam menggali dan mengekspresikan pengetahuan melalui penulisan ilmiah, memberi dorongan dan motivasi untuk belajar lebih banyak serta mendapatkan pengalaman yang intensif berkaitan dengan sumberdaya manusia. Disamping itu untuk memberikan masukan kepada:

- a. Depdiknas dalam rangka pembinaan kepala sekolah berkaitan dengan penerapan pengelolaan pendidikan inklusi.
- b. Memberikan masukan pada SD yang berada di lingkungan SDN 2 Sragen yang memiliki siswa berkelainan bisa diikutkan pada pendidikan inklusi di SDN 2 Sragen.
- c. Peneliti lain, sebagai acuan untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan khusus (inklusi).

#### **E. Daftar Istilah**

##### **1. Pengelolaan Pendidikan**

Pengelolaan adalah dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai Management, yang berarti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya



yaitu kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengelolaan diartikan dengan “penyelenggaraan, pengurusan”.

## 2. Karakter

Bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Sementara berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak.

## 3. Pola Asuh Orang Tua

Cara mendidik dan membimbing orang tua kepada anaknya yang mengarah kepada pengembangan pribadi dan menentukan perilaku bagi anak dalam suatu keluarga. Sedangkan orang tua yang penulis maksud adalah ayah dan ibu apabila siswa masih mempunyai orang tua lengkap, atau salah satu baik ayah maupun ibu apabila siswa hanya mempunyai ayah atau ibu saja.

## 4. Ancaman

Penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Suatu hal yang alamiah bila memandang bullying sebagai suatu kejahatan, dikarenakan oleh unsur-unsur yang ada di dalam *ancaman* itu sendiri.